

"Kesenjangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Menggali Keterkaitan dan Solusi Kebijakan"

¹ Aqil Muhammad, ² Hana Salsabila, ³ Raehanun Aisyah Fitri

¹ aqilmuhammadhsb@gmail.com, ² hanasalsa13@gmail.com,

³ raehanunbatubara@gmail.com

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

Abstrak

Upaya untuk mengembangkan ekonomi yang terencana dan terarah harus bertujuan mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan adil dalam membagi pendapatan. Kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi melalui peluang kerja yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada isu-isu yang penting seperti kesenjangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Semua isu tersebut memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pustaka, dengan menganalisis berbagai dokumen terkait. Dalam upaya menangani kemiskinan, terdapat peran utama yang dimainkan oleh pemberdayaan masyarakat, pendidikan, akses pada modal keuangan, dan keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga memegang tanggung jawab dalam upaya melawan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan distribusi pendapatan memiliki hubungan yang rumit. Dalam konteks ini, pertumbuhan yang menguntungkan golongan miskin dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Menekankan pentingnya memahami ikatan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, dan kemampuan menerapkan strategi yang relevan demi mencapai kesejahteraan yang merata bagi semua.

Kata Kunci : Kesenjangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang terencana, terarah, dan tepat guna akan membawa dampak pada bentuk pembangunan yang dinamis. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mendorong pemerataan di tingkat lokal, sektoral, dan individual. Tujuan utama dalam upaya pembangunan ekonomi bukan hanya menciptakan pertumbuhan yang maksimal, tetapi juga menghilangkan atau mengurangi ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan, seperti terjadi dilema antara pembangunan ekonomi yang kuat dan redistribusi pendapatan, menjadi suatu situasi yang memerlukan kompromi sebagai tujuan yang ingin dicapai. Pilihan yang harus diambil adalah apakah hendak berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang pesat atau pada upaya untuk mencapai pemerataan.

Jika target pembangunan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, maka isu pemerataan cenderung diabaikan. Jika hanya sedikit orang kaya yang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka hanya mereka lah yang akan menikmati pertumbuhan tersebut. Sementara itu, kelompok masyarakat yang

tidak turut berkontribusi pada pertumbuhan akan tidak mendapatkan manfaat dari hal tersebut.

Dalam penelitian ini, kami akan mengeksplorasi hubungan antara ketiga variabel ini dengan tujuan mencari solusi kebijakan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mengatasi kemiskinan. Penting untuk mencatat bahwa upaya ini memiliki signifikansi, mengingat banyak negara di seluruh dunia sedang berjuang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk kebijakan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu bahwa kegiatan penelitian dilakukan melalui metoda kepustakaan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian, kemudian melakukan analisis fenomena

yang ada berdasarkan pada hasil studi pustaka yang telah dikumpulkan tersebut untuk kemudian diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian (Zed, 2004). Dokumen yang digunakan berasal dari buku-buku referensi, dan berbagai jurnal baik nasional maupun internasional, serta dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

C. HASIL & PEMBAHASAN

A. Sebab-sebab Terjadinya Kemiskinan dan Karakteristiknya

1. Terjadinya Kemiskinan

Banyak penjelasan yang diberikan tentang sebab-sebab kemiskinan. Banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia II menghadapi kemiskinan massa. Fokus utama masalah ini adalah keterbelakangan perekonomian negara-negara tersebut (Hardiman dan Midgley, seperti dikutip dalam Kuncoro, 1997:131).

Berdasarkan Kuncoro (1997:131), penduduk di negara tersebut mengalami kemiskinan karena mereka bergantung pada sektor pertanian yang menggunakan metode tradisional yang berjalan secara terpisah, sering kali disertai dengan sikap apatis terhadap lingkungan.

Menurut Kuncoro (1997:131), Sharp dan rekan-rekannya berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi yang menjadi penyebab kemiskinan. Pertama-tama, di tingkat yang lebih kecil, kemiskinan diakibatkan oleh ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya, yang pada gilirannya mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya terbatas yang berkualitas rendah. Selain itu, kemiskinan juga timbul karena adanya perbedaan dalam tingkat kualifikasi sumber daya manusia. Jika kualitas sumberdaya manusia rendah, maka produktivitas mereka juga rendah dan akibatnya upah mereka pun rendah. Ada berbagai alasan mengapa kualitas sumberdaya manusia ini rendah, yang dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keberuntungan dalam nasib, adanya perlakuan diskriminatif, atau karena keturunan yang tidak menguntungkan. Salah satu penyebab kemunculan kemiskinan adalah perbedaan dalam akses terhadap modal.

Menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997:132), ada tiga penyebab kemiskinan utama yang berkontribusi pada teori lingkaran setan kemiskinan. Yang pertama adalah keterbelakangan, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bersaing dengan negara-negara maju. Yang

kedua adalah ketidaksempurnaan pasar, yang menghambat kemampuan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar mereka dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah kurangnya modal, yang mengakibatkan produktivitas yang rendah. Pendapatan yang diterima mereka rendah dikarenakan produktivitas yang rendah. Pendapatan yang rendah akan berdampak pada tabungan dan investasi yang rendah pula.

2. Karakteristik Kemiskinan

Menurut Kartasmita (1993:4), masyarakat miskin memiliki karakteristik yang membuat mereka lemah dalam upaya berusaha dan memiliki keterbatasan akses pada kegiatan ekonomi. Akibatnya, mereka semakin tertinggal jauh dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.

Menurut Soemardjan (dalam Sumodingrat 1999:81), terdapat berbagai metode dalam mengukur kemiskinan dengan standar yang beragam. Meski begitu, ia masih memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama-tama, kemiskinan absolut mencerminkan kondisi di mana pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal,

kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kedua, kemiskinan relatif melibatkan perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan di suatu wilayah. Jenis kemiskinan ini dianggap relatif karena terkait dengan kesenjangan pendapatan antara berbagai kelompok sosial.

Menurut Chamber (1983:109), ada lima karakteristik yang mengelilingi individu dan keluarga miskin atau kurang beruntung, antara lain: (a) kemiskinan, (b) kelemahan fisik, (c) isolasi, (d) ketidakberdayaan.

Menurut Moeljarto (1995:98), dalam Poverty Profile, kemiskinan bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga mengandung enam alasan sebagai berikut: Pertama, kemiskinan adalah masalah kerentanan. Kemiskinan adalah saat seseorang tidak dapat mengakses berbagai kesempatan kerja karena sistem produksi dalam masyarakat tidak memberikan peluang bagi mereka untuk terlibat dalam proses produksi. Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, dan kelemahan secara emosional dan sosial muncul saat seseorang dihadapkan pada elit desa dan birokrat yang memiliki kekuatan dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi mereka, tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Akibatnya,

mereka merasa tidak berdaya. Kemiskinan juga berarti membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk makanan dengan kualitas dan jumlah yang terbatas. Karena jumlah anggota keluarga yang sangat banyak, menjadikan rasio ketergantungan meningkat. Adanya adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus mempertegas keberadaan kesenjangan sosial yang tak terputus.

Selanjutnya Supriatna (1997:82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin, antara lain:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.
4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas .
5. Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan dimaksudkan agar dapat pula mengetahui strategi program yang bagaimana yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.

B. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial.

Korten (dalam Hikmat, 2004:15-16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat:

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.

3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (empowerment). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.

Dengan demikian menurut Hikmat (2004:80) bahwa proses pembangunan masyarakat hendaknya diasumsikan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Arah pertumbuhan masyarakat selalu bertumpu pada semakin membesarnya partisipasi dalam struktur sosial.
- b) Terjadinya berbagai kondisi ketidakpuasan yang dirasakan oleh warga masyarakat dewasa ini harus dijadikan sebagai titik tolak bagi program pembangunan masyarakat.
- b. Ketidakpuasan yang dirasakan dan dialami oleh warga masyarakat harus disalurkan kedalam perencanaan dan tindakan pemecahan masalah bersama.
- c. Pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat harus mengikutsertakan pemimpin-pemimpin yang diidentifikasi dan diterima oleh berbagai kelompok sosial utama dalam masyarakat.
- d. Organisasi pelaksana program pembangunan masyarakat harus mengembangkan jalur komunikasi yang efektif-efisien dalam berbagai kelompok sosial utama masyarakat, serta memperkuat kemampuan kelompok itu untuk saling bekerjasama melaksanakan prosedur kerja yang luwes-fleksibel, tanpa merusak pola pengambilan keputusan (decision making) secara teratur.
- e. Penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada keputusan bersama warga masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan kecepatan langkah masyarakat dan

melibatkan warga masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan.

Mengapa pula pembangunan masyarakat dipandang sangat penting, Hikmat (2004:81) mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

1. Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif.
2. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa.
3. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat.
4. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi Masyarakat.

Salah satu alternatif dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas melalui gerakan yang luas. Tujuan dari gerakan ini adalah menghapus anggapan bahwa penanggulangan kemiskinan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Partisipasi aktif masyarakat memperlihatkan bahwa mereka memiliki empati yang mendalam, yang berasal dari prinsip saling kasih, saling asuh, dan saling asah. Pemerintah menunjukkan kepeduliannya dalam penanggulangan kemiskinan melalui penekanan pada Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gerdu Taskin) yang telah dimulai sejak tahun 1998. Gerdu Taskin adalah sebuah bentuk penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok masyarakat, masyarakat umum, dan keluarga yang mengalami kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 1998/1999 telah diterapkan kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Selanjutnya, dilakukan inisiatif yang dikenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PPK atau PNPM-P2KP). Program ini berfokus pada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut Sumodiningrat (1999:202), pemerintah memiliki peran penting dalam setiap program pembangunan yang melibatkan kepentingan masyarakat. Salah satu

program yang dirancang oleh pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengatasi tiga masalah utama dalam pembangunan, yaitu pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, cara yang dianjurkan untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan memberikan ruang gerak, fasilitas publik, dan peluang yang kondusif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian mereka, bukan mendorong mereka ke pinggiran atau membuat mereka bergantung pada bantuan orang lain.

C. Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Beberapa studi empiris menunjukkan determinan dari ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu : Adelman dan Morris (1973) dengan menggunakan teknik analisis diskriminan untuk mengamati hubungan antara berbagai indikator sosial dan ekonomi terhadap distribusi pendapatan, menemukan beberapa variabel penting yang mempengaruhi distribusi pendapatan yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga pendapatan per kapita

menurun, inflasi, ketimpangan pembangunan antara wilayah, banyaknya investasi pada proyek padat modal sehingga pengangguran meningkat, kebijakan industri substitusi impor sehingga barang-barang industri naik untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju akibat ketidakpastian permintaan negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat termasuk industri rumah tangga.

Ahluwalia (1976) mengkaji hubungan antara kontribusi pendapatan kelompok masyarakat yang berbeda, dengan menggunakan data 60 negara, menemukan pola hubungan antara tingkat pembangunan dengan ketimpangan yang menyerupai kurva U terbalik (mendukung hipotesis Kuznets) dan memberikan kesimpulan antara lain: (1) faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapatan dapat diidentifikasi yaitu : (i) pergeseran intersektoral dalam struktur produksi yang menyebabkan penurunan relatif kontribusi sektor pertanian tradisional dan pergeseran secara paralel penduduk ke sektor perkotaan; (ii) pengembangan pendidikan dan tingkat keahlian tenaga kerja; dan (iii) transisi demografis yang menyebabkan

menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. (2) rata-rata pendapatan dari kelompok pendapatan rendah meningkat sejalan dengan meningkatnya GNP per kapita, namun peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan kelompok berpendapatan tinggi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, hasil studi empiris yang dilakukan oleh Abdelbaki (2012) yang menganalisis ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendidikan di Bahrain, menunjukkan bahwa diantara berbagai penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan, yang terpenting adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan tingkat upah dan berkontribusi cukup besar terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

Hoeller, P. et al (2012), menganalisis tentang pemetaan ketimpangan pendapatan antar negara OECD menemukan bahwa terjadinya ketimpangan pendapatan disebabkan karena ketimpangan dalam pendapatan tenaga kerja yang disebabkan oleh perbedaan dalam upah, jam kerja, dan tingkat kemalasan dari para pekerja.

Analisis cluster yang dilakukan dalam penelitian Hoeller, antara lain menunjukkan bahwa pada kelompok negara yang berbicara bahasa Inggris (Australia, Canada, Ireland, New Zealand,

UK) dan Netherland diketahui bahwa penyebab ketimpangan pendapatan adalah adanya dispersi upah yang lebar dan high share dari pekerjaan paruh waktu menyebabkan ketimpangan pendapatan tenaga kerja diatas rata-rata OECD. Transfer tunai publik memberikan dampak redistribusi yang lebih besar, dan pajak rumah tangga yang bersifat progresif sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan, meskipun dispersi disposable income rumah tangga tersebut berada diatas rata-rata OECD. Kemudian, pada 5 negara emerging countries (Brazil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan) menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang juga lebih tinggi daripada kebanyakan negara-negara OECD lainnya. Pengalaman di kelima negara ini menunjukkan bahwa program transfer dapat secara efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.

D. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Kemiskinan.

Perdebatan mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan serta kemiskinan dimulai pertama kali oleh

Kuznets (1955) yang menyatakan bahwa keterkaitan antara pertumbuhan dan ketimpangan seperti kurva U terbalik: pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung memburuk dan tidak akan meningkat sampai negara tersebut mencapai status berpendapatan menengah. Kuznets menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan semakin tinggi, maka ketimpangan akan semakin menurun. Implikasi lebih lanjut hipotesis kuznets sangat jelas jika pada tahap awal pertumbuhan akan menciptakan ketimpangan, maka kemiskinan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk berkurang di negara-negara berkembang (Adams, 2003).

Studi mengenai relasi antara pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan terus berlanjut. Hasilnya terdapat berbagai macam pandangan mengenai keterkaitan tersebut. Sebagian ekonom memandang bahwa hubungan antara keduanya merupakan hubungan kausal timbal balik (Barro, 2000; dan Bourguignon, 2004). Forbes (2000), Banerjee dan Duflo (2001), lebih mendukung pandangan yang mengatakan bahwa distribusi pendapatanlah yang mempengaruhi pertumbuhan. Namun sebagian besar ekonom justru

berpandangan sebaliknya, bahwa pertumbuhanlah yang justru mempengaruhi ketimpangan dan kemiskinan (Kuznets, 1955; Dollar dan Kraay, 2001; Son dan Kakwani, 2003; dan Adams, 2003).

Pandangan yang terakhir ini yang kemudian melahirkan paradigma baru pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang berpihak kepada kaum miskin (pro-poor growth). Pertumbuhan hanya dapat dikatakan pro-poor jika sanggup menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Definisi yang lebih terukur dikemukakan oleh Klasen (2005), bahwa pertumbuhan hanya dapat disebut pro-poor jika tingkat pertumbuhan pendapatan orang miskin berada di atas tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata.

Gagasan Bank Dunia untuk pengentasan kemiskinan adalah ending extreme poverty dan promoting shared prosperity. Dalam kondisi terjadinya ketimpangan yang tinggi/meningkat, terutama ketika bersamaan dengan terbatasnya akses kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung, pertumbuhan pendapatan rata-rata tidak akan bertambah secara proporsional bagi masyarakat lapisan bawah. Sehingga kesejahteraan bersama (shared prosperity), dipahami sebagai suatu cara tidak hanya redistribusi kue ekonomi pada ukuran yang tepat, tetapi kue tersebut harus diperluas secara terus

menerus dan dibagikan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah sehingga secepat mungkin secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Narayan et al (2013) mengeksplor hubungan antara kesejahteraan bersama dengan pertumbuhan, ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan dalam kesempatan. Salah satu temuannya adalah bahwa tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dari pendapatan 40% penduduk berpendapatan terendah terjadi pada negara dengan ketimpangan yang menurun. 60% (31 dari 52) negara sampel dengan ketimpangan yang menurun menunjukkan pertumbuhan pendapatan 40% penduduk dengan pendapatan terendah, yang relatif lebih cepat (> 4% per kapita per tahun) dibandingkan dengan 33% (9 dari 27) negara sampel dengan ketimpangan yang meningkat.

Hasil empiris tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan negatif antara pertumbuhan pendapatan 40% kelompok berpendapatan terendah dengan ketimpangan pendapatan. Artinya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka perlu didukung adanya pemerataan pendapatan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan temuan beberapa studi empiris yang ada, misalnya Bourguignon (2004) dan Lopez (2004), bahwa pertumbuhan hanya mempunyai dampak terhadap penurunan kemiskinan jika terjadi perubahan distribusi pendapatan secara progresif.

Dalam menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, Todaro (2009) menyatakan bahwa yang menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar hidup orang-orang miskin, bukan hanya fokus kepada tingkat pertumbuhan saja tetapi juga perlu diperhatikan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yang terjadi.

E. Solusi yang Perlu Dilakukan untuk Mengatasi Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Todaro (2009) mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan diperlukan suatu paket kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain, yang meliputi empat unsur pokok kebijakan yang ditujukan untuk : (1) menghilangkan distorsi harga faktor, (2) tercapainya perubahan struktural di dalam distribusi

asset, kekuasaan dan akses pendidikan, yang disertai dengan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh penghasilan, (3) memperbaiki distribusi pendapatan: untuk golongan ekonomi kuat ditempuh melalui kebijakan perpajakan atas pendapatan dan kekayaan mereka, sedangkan untuk golongan ekonomi lemah ditempuh melalui penyediaan tunjangan finansial serta barang dan jasa konsumsi, (4) meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna dan pembangunan yang menekankan pada penyediaan fasilitas perawatan kesehatan, perumahan, pelatihan yang murah, perbaikan sarana pertanian, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Cingano (2014).

Dollar dan Kray (2001) mengatakan bahwa pertumbuhan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi si miskin jika pertumbuhan disertai dengan kebijakan penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan dalam perdagangan internasional, dan strategi pengentasan kemiskinan.

Kebijakan World Bank Group (WBG) untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bersama tidak hanya meningkatkan dimensi moneter dari kesejahteraan, tetapi juga dimensi non moneter, yang meliputi antara lain: pendidikan, kesehatan, nutrisi dan akses

terhadap infrastruktur esensial, pemberdayaan dan mendorong partisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. (World Bank, 2013).

Banyak cara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pertumbuhan ekonomi jelas fundamental. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kesejahteraan jika pola pertumbuhan mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan penduduk.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan dan kemiskinan lebih tinggi ketika pertumbuhan mengarah kepada sektor padat tenaga kerja (Loayza and Raddatz, 2010, dalam Narayan, 2013). Tetapi untuk mencapai hal tersebut, pertumbuhan perlu untuk didiversifikasi dan untuk mendorong kesempatan kerja pada berbagai sektor. Sedangkan proses transformasi ekonomi didorong oleh sektor swasta, negara perlu untuk berperan secara terbatas tapi memainkan peran yang krusial untuk meningkatkan persaingan, menciptakan iklim investasi, dan meningkatkan inovasi dalam sektor swasta. Peran ini meliputi penyediaan peraturan dan lingkungan makroekonomi yang memberikan kestabilan dan insentif bagi sektor swasta, dan investasi dalam barang-barang publik seperti infrastruktur

fisik dan manusia untuk membangun tenaga kerja modern.

Disamping itu, juga perlu memperhatikan kesehatan dan kestabilan kontrak sosial yang menjamin bagi masyarakat miskin. Kontrak sosial antara lain dapat menghasilkan program perlindungan sosial. Kontrak sosial yang mendorong kesejahteraan bersama juga harus memperkenankan investasi sosial dalam institusi yang meningkatkan kesempatan bagi semua. Redistribusi sumberdaya tidak hanya sekedar transfer pendapatan dari satu kelompok masyarakat ke kelompok yang lain, tetapi lebih kepada investasi dalam peningkatan kemampuan masyarakat sepanjang waktu dan antar generasi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu, untuk menghasilkan sumberdaya yang dibutuhkan seperti untuk investasi yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan berkelanjutan yang lebih tinggi sepanjang waktu. Pertumbuhan ekonomi mendorong kemampuan manusia yang lebih tinggi, yang memberikan umpan balik terhadap pertumbuhan. (World Bank, 2013).

Hoeller, P et al. (2012) menyatakan bahwa pengalaman di sebagian besar negara yang termasuk kelompok emerging economies, program transfer apabila tepat

asaran akan menjadi kekuatan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pengalaman Indonesia menunjukkan pada tahun 2005, dengan menerapkan program perlindungan sosial yang diimplementasikan dalam bentuk transfer tunai, telah mampu secara efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan khususnya selama periode krisis.

Upaya pengurangan kemiskinan harus sejalan dengan upaya untuk pemerataan pendapatan, karena menurut van Leeuwen and Földvári (2016) bahwa ketimpangan mempengaruhi kemiskinan.

KESIMPULAN

Ketimpangan kepemilikan sumber daya, buruknya kualitas sumber daya manusia, dan perbedaan akses terhadap modal menyebabkan terjadinya kemiskinan. Hal ini pada gilirannya menciptakan siklus kemiskinan tanpa akhir yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan. Ciri-ciri kemiskinan adalah lemahnya kewirausahaan, terbatasnya ketersediaan kegiatan ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan ketidakberdayaan serta kondisi yang tidak membahagiakan dalam berbagai bidang kehidupan. Perjuangan melawan kemiskinan harus fokus pada

pemberdayaan masyarakat, menciptakan kondisi yang mendukung upaya masyarakat untuk memecahkan permasalahan mereka, dan mengurangi kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi. Ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain pertumbuhan penduduk, inflasi, perbedaan struktur produksi, dan perubahan sektor ekonomi. Penting bahwa pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap perbedaan pendapatan.

Ketiga fenomena tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Ada beberapa teori yang menunjukkan hubungan kompleks antara ketiganya dan menimbulkan perdebatan mengenai arah sebab akibat. Mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan memerlukan kebijakan yang mencakup perubahan distribusi kekayaan, penerapan kebijakan pajak progresif, perluasan penggunaan teknologi, dan investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat penting untuk diupayakan, dan harus ditekankan pula bahwa negara mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan yang memberdayakan masyarakat dan

mengentaskan kemiskinan. Grup Bank Dunia mengedepankan konsep kesejahteraan bersama yang tidak hanya mencakup aspek finansial namun juga aspek non finansial seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Perhatian terhadap peran kontrak sosial, investasi sosial dan program perlindungan sosial dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sangat penting untuk mencapai kesejahteraan bersama. Program bantuan tunai memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelbaki, Hisham H, 2012. An Analysis of Income Inequality and Education Inequality in Bahrain. *Modern Economy*, 2012, 3, 675-685.
<http://www.SciRP.org/journal/me>
- Adams, Richard H. Jr. 2003. *Economic Growth, Inequality, and Poverty: Finding from a New Data Set*. Policy Research Working Paper 2972. World Bank. February.

- Adelman, Irma, and Morris, Cynthia, 1973. Economic Growth and Social Equity in Developing Countries, California, Stanford University Press. <http://books.google.co.id/>
- Ahluwalia, M.S. 1976. Inequality, Poverty, and Development. *Journal of Development Economics* Volume 3 issue 4. Desember, 1976. Pp 307-342. www.sciencedirect.com.
- American Economic Review volume 90 No. 4. September 2000 pp 869-887.
- Banerjee, A. And E. Duflo. 2003. Inequality and growth: what can data say? *Journal of*
- Barro, Robert J. 2000. Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic*
- Bourguignon, Francois, 2004. Poverty-Growth-Inequality Triangle, Paper was presented at the Indian Council for Research on International Economic Reations, New Delhi, on Februari 4, 2004.
- Chambers, Robert, (1983). *Rural Development, Putting the Last First*, Longman: London.
- Dollar, David and Aart Kraay. 2001. Growth is Good for the Poor. Policy Research Working
- Economic Growth, volume 8, pp 267-299.
- Forbes, Kristin J. 2000. Reassessment of The relationship between inequality and growth. *Growth* 5(1): 5-32. <http://web.worldbank.org/>
- Hikmat, Harry, (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Bandung.
- Hoeller, P. Et al., 2012. Less Income Inequality and More Growth-Are They Compatible? : Part 1. Mapping Income Inequality Across the OECD, OECD Economics Departement Working Papers, No. 924, OECD Publishing. Retrived from <http://dx.doi.org/10.1787/5k9h297wxbnr-en>. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1184226>
- Kartasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidessindo: Jakarta.
- Klassen, Stephen. 2005. Economic Growth and poverty reduction: measurement and polisy issues. Working Paper No. 246. <http://www.oecd.org/dev/35393795.pdf>.

- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.
- Kuznets, Simon. 1955. Economic Growth and Income Inequality, The American Economic Review Vol. 45. No. 1, pp. 1-28.
- Lopez, J. Humberto. 2004. Pro-Growth, Pro Poor: is there a trade off?. Policy research working paper #3378. The World Bank. <http://books.google.co.id/books?>
- Moeljarto, (1995). Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, PT. Tiara Wacana : Yogyakarta.
- Narayan, Ambar, Jaime Saavedra-Chanduvi, and Sailesh Tiwari, 2013. Shared Prosperity: Links to Growth, Inequality and Equality of Opportunity. Inequality in Focus, October
- Paper 2587. <http://web.worldbank.org/website/external/>
- Son, H. And N. Kakwani, 2003. Poverty Reduction: Do Initials Condition Matter?. Mimeo,
- Sumodiningrat, Gunawan, (1999). Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Todaro, Michael P and Stephen C. Smith, 2009. Economic Development, Eleventh Edition, Pearson Education Limited, England.
- Van Leeuwen, Bas and Földvári, Péter. 2016. The Development of Inequality and Poverty in Indonesia, 1932–2008. Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.52 (3).
- World Bank, 2013. Inequality in Focus, October 2013, The World Bank. <http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/inequality-in-focus-october-2013>.